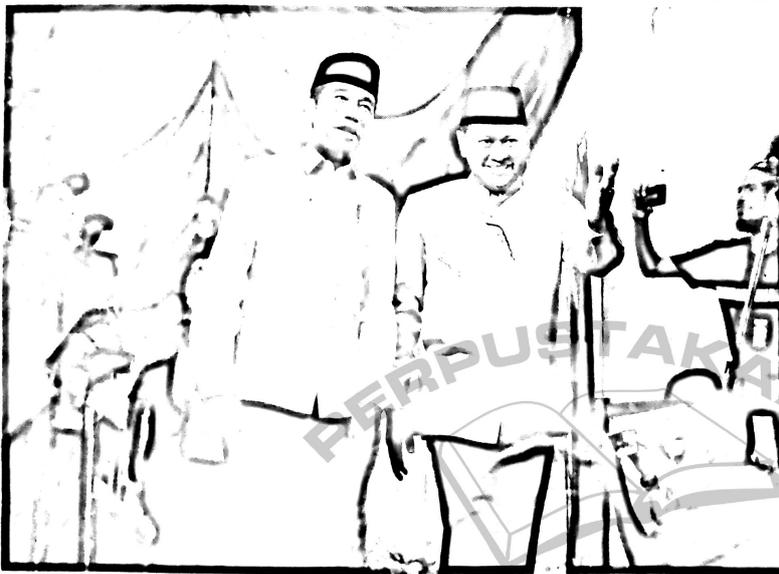


Judul : Presiden bentuk panel pemimpin KPK pekan ini
Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 18

Presiden Bentuk Panel Pemimpin KPK Pekan Ini

Pemerintah sudah menerima masukan daftar nama-nama calon anggota panitia seleksi yang dianggap layak.



Joko Widodo didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo saat berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR di Jakarta.

Maya Ayu Puspitasari
 maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Presiden Joko Widodo segera membentuk Panitia Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 pada pekan ini. Jokowi mengatakan pemerintah sedang menyusun daftar nama anggota panitia seleksi tersebut. "Baru digodok. Ponsel KPK insya Allah minggu ini sudah ditandatangani," kata Jokowi di Jakarta, kemarin.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah menerima banyak masukan daftar nama calon anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dari pelbagai pihak. Nama yang diusulkan berasal dari beragam profesi, seperti akademikus, praktisi, pemerintah, dan aktivis masyarakat sipil. "Banyak nama sudah masuk dan tinggal kami putuskan. Satu-satu kami lihat. Ya, seperti lima tahun

yang lalu, satu per satu kami lihat ya," katanya.

Masa tugas lima pemimpin KPK periode 2015-2019, yaitu Agus Rahardjo, Laode M. Syarief, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, dan Saut Situmorang, akan berakhir pada 21 Desember tahun ini. Sesuai dengan Pasal

"Baru digodok. Ponsel KPK insya Allah minggu ini sudah ditandatangani."

Joko Widodo
 Presiden RI

34 Undang-Undang KPK, masa jabatan pimpinan KPK adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan. Tahapan seleksi calon pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK

berlangsung sampai enam bulan. Dengan demikian, panitia seleksi seharusnya terbentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK periode 2015-2019 berakhir.

Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan pembentukan Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK sudah menjadi perhatian Presiden. Ia mengatakan Presiden Jokowi sudah melakukan pembahasan masalah ini secara internal, pekan lalu. "Tapi, untuk nama-nama, ini yang masih dicari," kata Johan.

Akhir Februari, Koalisi Masyarakat Sipil—di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum, dan Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada—menemui Sekretaris Negara Praktiko di kantornya. Ketua Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan

Koalisi Masyarakat Sipil menemui Praktiko untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah seharusnya membentuk Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK periode sekarang berakhir. "Kami sifatnya hanya memberi masukan ke pemerintah," kata Zainal, kemarin.

Anggota Divisi Hukum ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK seharusnya sudah terbentuk pada pekan ketiga bulan ini. Sebab, pimpinan baru KPK harus dilantik pada akhir Desember mendatang. Ia mengatakan proses seleksi ini membutuhkan waktu lama, dari pendaftaran, seleksi administrasi, wawancara, hingga uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau berlarut-larut, proses pemilihan calon Pemimpin KPK ini akan terancam tidak tepat waktu," kata

Sembilan Srikandi

SEMILAN perempuan terpilih menjadi anggota Panitia Seleksi Calon Komisiner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Saat membentuk panitia lima tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa nama-nama yang dipilih adalah pakar di bidang hukum pidana, hukum tata negara, bisnis, ekonomi, manajemen organisasi, sosiologi, psikologi, dan tata kelola pemerintahan.

Berikut ini daftar anggota Panitia Seleksi KPK periode pertama Jokowi:

Ketua Panitia Seleksi Detry Damayanti

- Pekerjaan: Kepala ekonom Bank Mandiri
- Keahlian: ekonomi dan keuangan



Wakil Ketua Enny Nurbaningsih

- Pekerjaan: Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM
- Keahlian: hukum tata negara



Anggota Harkristuti Harkrisnowo

- Pekerjaan: Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Hukum Pidana dan HAM Fakultas Hukum UI
- Keahlian: hukum pidana



Betti S. Ailshabhana

- Pekerjaan: Mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan, Ketua Majelis Wali Amanat ITB
- Keahlian: bisnis dan manajemen



Yenti Garnasih

- Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Keahlian: hukum pidana ekonomi dan pencucian uang



Supra Wimbarti

- Pekerjaan: Dekan Fakultas Psikologi UGM
- Keahlian: psikologi SDM dan pendidikan



Natalia Subagyo

- Pekerjaan: Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Keahlian: tata kelola pemerintahan



Dani Sadiawati

- Pekerjaan: Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Keahlian: tata kelola pemerintahan



Meuthia Ganie-Rochman

- Pekerjaan: Dosen FISIP Universitas Indonesia
- Keahlian: Sosiologi korupsi dan modal sosial



Kurnia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung seruan Koalisi Masyarakat Sipil agar Presiden Jokowi segera membentuk Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK. Politikol "Golkar ini mengatakan keberadaan panitia seleksi ini san-

gat membantu proses penyaringan kandidat pimpinan KPK. "Kami parlemen mendukung jika Presiden segera membentuk panitia seleksi," kata Bambang, kemarin.

● AHMAD FAIZ IBNU SANI | RUSMAN PARABUEQ | BUDIARTI UTAMI PUTRI

TEMPUS/STRIKANDITO/ANWAR/AL-HUDA/AT-BARPENAS/GO/ID/UPS/GO/ID